



## Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia

Anya Regista Cahyani<sup>1</sup>, Difa Ardini<sup>2</sup>, Salsabilah Nurhidayah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email : <sup>1\*</sup>[221410119.anya@uinbanten.ac.id](mailto:221410119.anya@uinbanten.ac.id), <sup>2</sup>[221410122.difa@uinbanten.ac.id](mailto:221410122.difa@uinbanten.ac.id),

<sup>3</sup>[221410127.salsabilah@uinbanten.ac.id](mailto:221410127.salsabilah@uinbanten.ac.id)

Korespondensi penulis : [221410119.anya@uinbanten.ac.id](mailto:221410119.anya@uinbanten.ac.id)

**Abstract** Inflation is a significant economic challenge in Indonesia, affecting price stability and people's purchasing power. In a sharia economic perspective, inflation is not only seen as an economic phenomenon, but also involves moral and social aspects. This article discusses the role of sharia monetary instruments in controlling inflation in Indonesia, highlighting the principles of fairness and transparency. Instruments such as Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), Bank Indonesia Sharia Savings Facilities (FASBIS), and Sharia Open Market Operations (OPT) have been implemented to regulate the amount of money in circulation and maintain economic stability. Although their contribution to controlling inflation is still limited, the potential of sharia instruments can be strengthened through increasing market understanding, education and collaboration between the government, Bank Indonesia and sharia financial institutions. With more optimal implementation, sharia monetary instruments can create a stable, fair and sustainable economic system for the Indonesian people.

**Keywords:** Inflation, Monetary, Sharia.

**Abstrak** Inflasi merupakan tantangan ekonomi yang signifikan di Indonesia, yang memengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, inflasi tidak hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek moral dan sosial. Artikel ini membahas peran instrumen moneter syariah dalam pengendalian inflasi di Indonesia, dengan menyoroti prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPT) telah diterapkan untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun kontribusinya terhadap pengendalian inflasi masih terbatas, potensi instrumen syariah dapat diperkuat melalui peningkatan pemahaman pasar, edukasi, dan kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan syariah. Dengan penerapan yang lebih optimal, instrumen moneter syariah dapat menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** Inflasi, Moneter, Syariah.

### 1. PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu tantangan ekonomi yang paling signifikan di Indonesia, mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi syariah, inflasi tidak hanya dilihat sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa, tetapi juga sebagai isu yang menyentuh aspek moral dan etika. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan pelarangan praktik riba, yang seringkali menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dalam kerangka ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang holistik, yang mengintegrasikan instrumen moneter syariah dengan nilai-nilai moral dan sosial.

Dalam upaya untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab untuk menerapkan berbagai instrumen pengendalian moneter yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk menjaga stabilitas likuiditas di pasar keuangan, serta mencegah terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat. Beberapa instrumen utama yang digunakan termasuk Giro Wajib Minimum (GWM), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Melalui penerapan instrumen-instrumen ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan adil, serta mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun instrumen moneter syariah memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pengendalian inflasi, tantangan yang ada masih cukup besar. Penelitian menunjukkan bahwa dampak dari instrumen-instrumen tersebut terhadap pengendalian inflasi belum signifikan, disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang mekanisme kerja instrumen syariah di kalangan pelaku pasar dan masyarakat. Selain itu, sistem moneter ganda yang ada di Indonesia di mana instrumen konvensional dan syariah berjalan berdampingan menjadi kendala dalam mencapai tujuan pengendalian inflasi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan instrumen moneter syariah.

Pentingnya kontribusi instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi, diharapkan dapat tercapai stabilitas harga yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Edukasi mengenai ekonomi syariah perlu diperkuat agar pemahaman tentang pentingnya keadilan ekonomi semakin meluas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi instrumen moneter syariah dalam pengendalian inflasi di Indonesia serta tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, jurnal ini akan membahas secara mendalam mengenai instrumen pengendalian moneter syariah yang diterapkan di Indonesia, analisis efektivitasnya dalam mengendalikan inflasi, serta rekomendasi untuk meningkatkan kontribusi instrumen-instrumen tersebut dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi di bidang ekonomi syariah serta memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan resmi terkait inflasi dan instrumen moneter syariah. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep inflasi dalam perspektif ekonomi syariah, instrumen moneter yang digunakan, serta kebijakan pengendalian inflasi yang telah diterapkan di Indonesia dan negara-negara lain. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan meninjau teori-teori ekonomi syariah serta studi empiris yang tersedia dalam literatur.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup referensi primer dan sekunder. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menyoroti konsep-konsep utama, penerapan kebijakan, serta efektivitas instrumen moneter syariah dalam mengendalikan inflasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan moneter syariah, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Inflasi dalam Ekonomi Syariah

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang serius dan kompleks, terutama dalam konteks Indonesia, di mana dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, inflasi tidak hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa, tetapi juga sebagai isu yang melibatkan aspek moral dan etika. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk inflasi alamiah (*natural inflation*) yang muncul akibat bencana alam atau kekurangan pasokan, serta inflasi akibat kesalahan manusia (*human error inflation*) yang terkait dengan kebijakan ekonomi yang buruk, korupsi, dan pajak yang berlebihan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dalam kerangka ekonomi syariah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

Dalam upaya pengendalian inflasi, instrumen moneter syariah memiliki peran penting yang dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu pendekatan utama adalah penerapan sistem moneter berbasis syariah yang melarang praktik riba dan spekulasi berlebihan. Dengan menghindari instrumen-instrumen yang berbasis bunga dan praktik-praktik

tidak etis, sistem ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan adil. Selain itu, manajemen mata uang yang baik juga diperlukan untuk mengendalikan pertumbuhan uang beredar dan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dalam konteks ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah guna mencegah terjadinya inflasi yang merugikan.

Keberhasilan pengendalian inflasi melalui instrumen moneter syariah juga sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, otoritas moneter, dan masyarakat. Penerapan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan melalui zakat, infak, dan sedekah dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini penting untuk meredam tekanan inflasi yang sering kali disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Selain itu, mendorong pola konsumsi yang moderat dapat membantu menurunkan permintaan agregat, sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Dengan demikian, kontribusi instrumen moneter syariah dalam pengendalian inflasi di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya stabil tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **Instrumen Pengendalian Moneter Syariah**

Instrumen pengendalian moneter syariah di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Dalam konteks ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tertinggi telah menetapkan berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa instrumen utama yang digunakan meliputi Giro Wajib Minimum (GWM), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). GWM berfungsi untuk mengatur jumlah uang yang harus disimpan bank di Bank Indonesia, sehingga dapat mempengaruhi likuiditas perbankan. SBIS, sebagai surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, memberikan alternatif investasi bagi bank syariah dan membantu mengatur jumlah uang beredar. Sementara itu, FASBIS menyediakan fasilitas bagi bank syariah untuk menyimpan dananya di Bank Indonesia, yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian likuiditas.

Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPT) juga merupakan instrumen penting dalam pengendalian moneter syariah. Melalui OPT, Bank Indonesia dapat melakukan pembelian atau penjualan surat berharga syariah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Hal ini memungkinkan Bank Indonesia untuk menyesuaikan likuiditas sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu. Selain itu, Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara (RRSBSN)

berfungsi sebagai instrumen untuk menarik likuiditas dari pasar dengan cara menjual surat berharga kepada bank dan kemudian membelinya kembali pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan inflasi tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan.

Meskipun instrumen moneter syariah memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pengendalian inflasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi tersebut masih tergolong kecil. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa instrumen yang diterapkan, dampaknya terhadap pengendalian inflasi belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang instrumen syariah di kalangan pelaku pasar dan keterbatasan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, sistem moneter ganda yang diterapkan di Indonesia di mana instrumen konvensional dan syariah berjalan berdampingan juga menciptakan tantangan dalam mencapai tujuan pengendalian inflasi secara efektif.

Keterbatasan kontribusi instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam sektor perbankan syariah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai instrumen-instrumen moneter syariah kepada masyarakat dan pelaku industri. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan akan ada peningkatan partisipasi dalam penggunaan instrumen-instrumen tersebut. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan syariah perlu diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan efektif dalam mengendalikan inflasi.

Secara keseluruhan, meskipun instrumen pengendalian moneter syariah memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Indonesia, tantangan yang ada memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Dengan upaya bersama dalam meningkatkan efektivitas penggunaan instrumen-instrumen ini serta memperkuat kerangka kebijakan moneter syariah, diharapkan dapat tercapai kondisi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

### **Penerapan Instrumen Moneter Syariah di Beberapa Negara**

Pembahasan mengenai kebijakan moneter juga merupakan pembahasan yang sangat signifikan dalam ekonomi Islam, ekonomi Islam sangat mementingkan topik kebijakan moneter sebagai alat kebijakan publik. Namun tujuannya agak berbeda, mengingat Islam melarang riba, yang berarti bahwa alat yang digunakan berbeda dari sistem moneter ekonomi lainnya.

Chapra berpendapat bahwa selain ketidakadilan, riba atau bunga juga menyebabkan misalokasi sumber daya, kondisi tidak stabil, pertumbuhan tidak teratur, dan masalah lainnya. Karena hanya menguntungkan pemberi pinjaman dan mengabaikan risiko ketidakpastian yang harus ditanggung pelaku usaha, maka dalil ketidakadilan menjadi pembenaran utama untuk mengkriminalisasi gagasan riba.

Bunga merupakan komponen dari hampir semua instrumen moneter yang menjalankan kebijakan moneter konvensional serta aset yang mendasarinya. Oleh karena itu, kebijakan moneter berbasis Islam tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrumen konvensional yang memasukkan unsur suku bunga (suku bunga bank, tingkat diskonto, dan operasi pasar terbuka dengan surat berharga yang ditentukan sebelumnya). Meskipun demikian, beberapa pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa berbagai alat kebijakan moneter tradisional, termasuk persyaratan cadangan, plafon kredit umum dan selektif, persuasi moral, dan perubahan basis moneter, masih dapat digunakan untuk mengatur uang dan kredit. Sekuritas berbasis ekuitas juga dapat digunakan untuk mengatur operasi pasar terbuka.

*Tabel 1 Penggunaan Instrumen Moneter di beberapa Negara Muslim*

No	Negara	Instrumen
1.	Sudan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Central Bank Musharaka Certificates (CMCs)</li> <li>2. Government Musharaka Certificates (GMCs)</li> <li>3. Government Investment Certificates (GICs)</li> <li>4. Foreign Exchange</li> </ol>
2.	Iran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen Syariah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musyarakah (pembiayaan bagi hasil)</li> <li>- Mudarabah (kemitraan usaha)</li> <li>- Sukuk (obligasi syariah)</li> <li>- Ijarah (sewa)</li> </ul> </li> <li>2. Rasio Cadangan Wajib <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penentuan rasio cadangan minimum bank</li> <li>- Berbeda untuk tiap jenis simpanan</li> <li>- Disesuaikan dengan prinsip syariah</li> </ul> </li> <li>3. Credit Ceiling <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatasan alokasi kredit bank</li> <li>- Pengendalian pertumbuhan kredit sectoral</li> <li>- Pengarahan kredit ke sektor prioritas</li> </ul> </li> <li>4. Tingkat Bagi Hasil <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan expected rate of profit</li> <li>- Batas maksimum dan minimum margin bank</li> <li>- Berbasis prinsip syariah</li> </ul> </li> <li>5. Operasi Moneter Syariah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jual beli sukuk pemerintah</li> <li>- Penerbitan sertifikat investasi Bank Markazi</li> <li>- Transaksi repo syariah</li> </ul> </li> </ol>
3.	Malaysia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mudarabah Interbank Investment (MII)</li> <li>2. Wadiah Acceptance</li> <li>3. Government Investment Issue (GII)</li> <li>4. Bank Negara Monetary Notes-i (BNMN-i)</li> <li>5. Sell and Buy Back Agreement (SBBA)</li> <li>6. Cagamas Mudharabah Bonds (SMC)</li> <li>7. When Issue (WI)</li> <li>8. Islamic Accepted Bills (IAB)</li> <li>9. Islamic Negotiable Instruments (INI)</li> <li>10. Islamic Private Debt Securities</li> <li>11. Ar Rahn Agreement-I (RA-i)</li> <li>12. Sukuk BNM Ijarah (SBNMI)</li> <li>13. Wadiah Interbank Acceptance (WIA).</li> <li>14. Mudharabah Money Market Operations</li> <li>15. Bank Negara Negotiable Notes yang berisi sukuk al-ijarah</li> </ol>

## Instrumen Pengendalian Moneter Syariah di Indonesia

BI menggunakan sejumlah alat pengendalian moneter yang efektif untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

*Tabel 2 Penggunaan Instrumen Moneter di Negara Indonesia*

Negara	Instrumen Moneter
<b>Indonesia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen pengendalian moneter langsung                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan nilai uang</li> <li>- Kredit langsung</li> </ul> </li> <li>2. Instrumen pengendalian moneter tidak langsung                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giro Wajib Minimum</li> <li>- Fasilitas Diskonto (Tingkat Suku Bunga)</li> <li>- Operasi Pasar Terbuka (OPT)</li> <li>- Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)</li> <li>- Imbauan Moral</li> </ul> </li> </ol> <p>Termasuk pembelian dan penjualan surat berharga oleh bank sentral. Berikut ini adalah beberapa alat yang digunakan dalam operasi pasar di Indonesia, khususnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)</li> <li>2) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)</li> <li>3) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)</li> <li>4) Reverse Repo – Sertifikat Bank Syariah Negara (RR-SBSN)</li> <li>5) Sertifikat Deposito</li> <li>6) Commercial Paper</li> <li>7) Call Money</li> <li>8) Wesel dan Promes</li> <li>9) Repurchase Agreement</li> <li>10) Bill of Exchange</li> <li>11) Banker’s acceptance</li> </ol>

Pertumbuhan Sektor Perbankan Syariah di Indonesia telah muncul sebagai manfaat sistem ekonomi di Indonesia. Sebagai otoritas moneter, BI telah menetapkan sejumlah alat pengendalian moneter syariah yang mengatur kelangsungan hidup sektor perbankan syariah. Beberapa instrumen diidentifikasi, masing-masing memiliki tujuan yang sama seperti pada sistem perbankan konvensional. Namun, kebijakan tersebut ditetapkan sesuai dengan aturan syariah.



Arti dari instrumen moneter syariah yang digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Surat Berharga yang diterbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau disingkat SbIS didasarkan pada Hukum syariah mempunyai jangka waktu yang pendek jika diterapkan pada mata uang Rupiah Bank Indonesia.
2. Sukuk yang dikenal juga dengan Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara terkadang disingkat menjadi RR-SBSN. Sebagai bukti keterlibatan aset SBSN dalam mata uang Rupiah, negara menerbitkan surat berharga negara berdasarkan prinsip syariah.
3. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah yang sering disebut FASBIS merupakan fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Indonesia kepada pialang pasar uang valas, bank umum syariah, dan unit usaha syariah dalam mata uang Rupiah agar dapat menyetorkan uang ke bank.
4. Pada bank syariah, Giro Wajib Minimum (GWM) ditetapkan sesuai dengan aturan dan imbauan BI. Bagi perbankan Islam, moral mempunyai arti yang kurang lebih sama dengan apa yang BI lakukan pada perbankan konvensional.
5. Dana dipinjam dari satu bank melalui PUAS, atau Pasar Uang Antar Bank Syariah. Mempunyai kelebihan likuiditas pada bank lain yang memerlukannya. Transaksi PUAS dapat diselesaikan dalam waktu satu hari kerja (semalam) atau sampai dengan satu tahun.

### **Instrumen Pengendalian Inflasi Menurut Syariah di Indonesia**

Inflasi merupakan tantangan ekonomi yang signifikan di Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengendalian inflasi tidak hanya dilihat dari sisi teknis ekonomi tetapi juga dari aspek moral dan sosial. Instrumen pengendalian inflasi menurut syariah menekankan pada keadilan dalam distribusi pendapatan, pelarangan praktik riba, serta penerapan sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam seperti zakat, wakaf, dan infaq. Instrumen ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dengan tetap menjaga keberlanjutan ekonomi secara etis.

Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat mengadopsi instrumen syariah seperti penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk mengendalikan likuiditas di pasar keuangan. Selain itu, penerapan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah juga mampu mengurangi inflasi karena tidak mendorong spekulasi

seperti yang terjadi dalam sistem bunga. Kebijakan fiskal yang mendukung redistribusi kekayaan melalui zakat, pajak progresif, dan subsidi berbasis kebutuhan primer juga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Penerapan instrumen pengendalian inflasi berbasis syariah membutuhkan kerangka regulasi yang kuat serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Edukasi mengenai ekonomi syariah juga perlu diperkuat agar pemahaman tentang pentingnya keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan semakin meluas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi, diharapkan inflasi di Indonesia dapat dikendalikan secara lebih efektif dan berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi syariah menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan pelarangan praktik riba. Instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPT) telah diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Selain itu, penerapan sistem bagi hasil dan redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah dapat mengurangi ketimpangan sosial serta memperkuat daya beli masyarakat.

Namun, efektivitas instrumen moneter syariah dalam pengendalian inflasi di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan implementasi, kurangnya pemahaman di kalangan pelaku pasar, dan keberadaan sistem moneter ganda. Untuk mengoptimalkan potensi instrumen ini, diperlukan edukasi yang lebih luas, penguatan regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah, otoritas moneter, serta lembaga keuangan syariah. Dengan sinergi yang baik, sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan dapat terwujud, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Syafitri, Harahap, F. A., Syahputri, M., Lubis, N. A., Nurhalimah, S., & Yusliani. (2024). Efektivitas instrumen kebijakan moneter syariah dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. 8(6), 318–326.
- Bayuni, E. M., & Srisusilawati, P. (2018). Kontribusi instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 18–38.
- Deviana Putri Septia Ningrum, Siti Aisyah Hidayatul Hasanah, Yuni Zaroh, & Naufal Firdaus. (2024). Pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap stabilitas mata uang. 2(6).
- Islamiyah, S. B., & Ariza, A. (2024). Analisis interaksi instrumen moneter syariah terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1249–1260.
- Kuriningsih, R. D., Izmuddin, I., & Padli, H. (2023). Strategi pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 2(2), 3–6.
- Kurniawati, F. (2019). Pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam (Studi efektivitas instrumen moneter syari'ah di Lampung). *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–24.
- Mugiyati. (2008). Analisis manajemen moneter Islami. *Al-Qanun*, 11(2).
- Mutmainah, A., Arofiani, D. C. K., Nasution, H. R., & Sambo, R. A. (2024). Kajian peran kebijakan moneter syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 4, 567–573.
- Novita, H., et al. (2024). Peran kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. 2(1), 44–47.
- Sinaga, A. S., Fuadi, A., & Sinaga, A. (2022). Peranan instrumen kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara periode 2012-2021. *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, 1(2), 62–71. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jisc>